

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban Negara dalam memberikan solusi bagi para penyintas pelanggaran kebebasan umum, salah satunya adalah Peraturan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Dasar kebebasan, yang menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran kebebasan dasar yang serius atau yang berpotensi sebagai penerima manfaat utamanya dapat memperoleh remunerasi, kompensasi dan pemulihan. Remunerasi, kompensasi, dan pemulihan.
2. Terhadap pelanggaran kebebasan umum bersih, negara berkewajiban untuk menyelidiki peristiwa pelanggaran kebebasan dasar yang berat dan untuk mendakwa pelakunya dan menolaknya setiap kali dianggap tercela, serta memberikan remunerasi, pemulihan, dan pembayaran kepada korban. Komitmen ini menunjukkan bahwa Negara bertanggung jawab untuk menyelesaikan restitusi yang berhasil bagi korban.

B. Saran-Saran

1. Otoritas publik seharusnya menawarkan bantuan dalam memenuhi hak-hak istimewa para korban pelanggaran kebebasan umum yang berat mengingat peraturan dan pedoman yang menyeluruh, terutama membuat pedoman yang unggul untuk menjamin kepuasan kebebasan para penyintas pelanggaran kebebasan dasar.
2. Otoritas publik harus membantu semua yayasan penting untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan pengamatan dan pengawasan sejauh pelaksanaan pedoman yang ada yang mengatur kepuasan kebebasan korban pelanggaran kebebasan

umum yang berat sehingga kepuasan hak istimewa para penyintas pelanggaran kebebasan dasar bruto dapat berjalan dengan baik.

